



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUNARSO**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **632844**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 431 m2 di TUBAN, WARISAN Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 21.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 28D309946 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA NF11T11C01M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HOND HIBO2N4ILO AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 83.238.042

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 754.238.042

**III. HUTANG**

Rp. 29.520.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 724.718.042

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.